BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang kerja praktek

Sejalan dengan perkembangan gagasan yang terjadi diberbagai negara, peran negara dan pemerintah bergeser dari pemerintah *(goverment)* menjadi kepemerintahan *(governance)*. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam paradigma pemerintahan yang baik *(good gevernance)* terdapat prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas dan supermasi hukum. (Suhandi & Fernanda, 2001).

Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah berhasil menetapkan paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 (UU 17/2003) tentang Keuangan Negara, UU UU Nomor 1 Tahun 2004 (UU 1/2004) tentang Pembendaharaan Negara dan UU Nomor 5 Tahun 2004 (UU 5/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi reformasi di bidang keuangan negara, dari administrasi keuangan *(financial administration)* menjadi pengelolaan keuangan *(financial management)*. Reformasi keuangan negara ini dipelopori oleh Departemen Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang APBN No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Suatu Kerja yang dipimpinnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung adalah entitas akuntansi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun laporan kerja praktek ini dengan judul **"PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG (BPN RI Kabupaten Bandung)".**

1.2. Tujuan Kerja Praktek

Dalam hal ini penulis dalam menyusun laporan kerja praktek memiliki tujuan. Adapun tujuan dalam laporan kerja praktek ini antra lain :

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui jenis – jenis laporan apa saja yang dibuat dalam laporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui hambatan dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Penulis berharap dengan adanya laporan ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat sejalan dengan tujuan dilaksanakannya kerja praktek.

Hasil kerja praktek ini diharapkan berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi semua kalangan baik bagi aspek keilmuan (teoritis) maupun bagi aspek guna laksana (praktis).

1. Kegunaan praktis

   Bagi instansi, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya informasi terkait Laporan Keuangan.

2. Kegunaan teoritis

   Untuk Pengembangan ilmu manajemen keuangan, memberikan referensi tentang dasar hukum, jenis-jenis laporan dalam Laporan Keuangan dan prosedur penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

1.4. Lokasi dan waktu kerja praktek

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan laporan kerja praktek, dalam Kerja Praktek pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang berlokasi di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung sedangkan waktu kerja praktek yang dilaksanakan dari tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011. Hari kerja praktek yang berlaku dari hari Senin sampai dengan Jum'at dan waktu pelaksanaan kegiatan kerja praktek dimulai pukul 08.00-15.00 WIB.